

Lampiran 1

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Dewan Gubernur Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2

JAKARTA 10110

Up. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPR

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan rencana nama yang berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya

Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sampaikan:

1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar.
2. Daftar calon pemegang saham/calon anggota *) disertai dokumen yang dipersyaratkan.
3. Daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan.
4. Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia.
5. Analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap:
 - a. aspek demografi dan ekonomi wilayah;
 - b. jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro;
 - c. rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 - d. proyeksi keuangan secara bulanan untuk tahun pertama dan secara tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan
 - e. perencanaan sumber daya manusia;
6. Rencana sistem dan prosedur kerja.
7. Fotokopi bilyet deposito sebesar Rp. (.....) atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. untuk pendirian BPR yang merupakan % (..... perseratus) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan, yang telah berisi keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

8. Surat ...

Lanjutan Lampiran 1

8. Surat pernyataan dari calon pemegang saham/anggota *) bahwa setoran modal:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; dan
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Demikian permohonan kami.

Nama dan tandatangan calon pemilik

cc : Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 2

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Dewan Gubernur Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2

JAKARTA 10110

Up. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

Perihal : Permohonan Izin Usaha BPR

Menunjuk surat Bank Indonesia Nomor tanggal perihal persetujuan prinsip BPR dengan ini kami:

Nama BPR :

Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan:

1. Akta pendirian BPR termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
2. Daftar pemegang saham/anggota *) disertai dokumen yang dipersyaratkan**).
3. Daftar susunan anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan **).
4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia.
5. Fotokopi bilyet deposito sebesar Rp. (.....) atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. untuk pendirian BPR yang merupakan % (..... perseratus) dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan, yang telah berisi keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
6. Surat pernyataan dari pemegang saham/anggota *) bahwa setoran modal:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; dan
 - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

7. Bukti ...

Lanjutan Lampiran 2

7. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:
 - a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
 - c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - d. contoh formulir/ warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

cc : Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten)

*) coret yang tidak perlu

**) apabila terdapat perubahan

Lampiran 3

.....

No. :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor tanggal perihal pemberian izin usaha BPR, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pencairan Deposito dari modal disetor BPR yang berada pada Bank dengan alamat

Rincian Deposito tersebut adalah sebagai berikut :

No.	No. Seri Deposito/No Rekening	Atas Nama Dewan Gubernur QQ	Nominal (Rp)
1.			
2.			
...			
...		Total	

Dana tersebut akan kami pergunakan untuk operasional BPR

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 4

.....

No. :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPR

Menunjuk Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Usaha BPR, dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan usaha pada tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas), dengan tembusan kepada DPBPR

Lampiran 5

No. :
Lampiran:

Kepada
Bank Indonesia
Up. *)

Perihal : Pemohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan kepemilikan BPR yang diakibatkan oleh pengalihan saham/penambahan pemegang saham baru dan/atau pengeluaran saham baru **) dengan keterangan sebagai berikut:

A. Kepemilikan BPR saat ini:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Prosentase (%)
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

B. Rencana kepemilikan BPR yang baru:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Prosentase (%)
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan dari calon pemegang saham/calon anggota **).

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

Lampiran 6

No. :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Perubahan Kepemilikan BPR

Menunjuk surat persetujuan Bank Indonesia Nomor tanggal, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal, telah dilakukan perubahan kepemilikan BPR yang diakibatkan pengalihan saham/penambahan pemegang saham baru dan/atau pengeluaran saham baru**) dengan keterangan sebagai berikut:

A. Komposisi kepemilikan BPR yang lama:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Prosentase (%)
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

B. Komposisi kepemilikan BPR yang baru:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Prosentase (%)
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

Terlampir kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaporan perubahan kepemilikan.

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

Lampiran 7

.....

No. :

Kepada

Bank Indonesia
Up. *)

Perihal : Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan BPR

Dengan ini kami laporkan bahwa pada tanggaltelah dilakukan perubahan komposisi kepemilikan BPR yang diakibatkan adanya penambahan modal disetor/tanpa penambahan modal disetor **) sebagai berikut:

A. Kepemilikan BPR sebelum perubahan:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Prosentase (%)
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

B. Kepemilikan BPR setelah perubahan:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Prosentase (%)
1.				
2.				
Dst				
	Jumlah			

Terlampir kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

Lampiran 8

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Perubahan Modal Dasar BPR

Sehubungan dengan perubahan modal dasar BPR, dengan ini kami sampaikan:

1. risalah rapat umum pemegang saham/ rapat anggota **)
2. perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang yang kami terima dari Notaris pada tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

Lampiran 9

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR **)

Dengan ini kami mengajukan calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris BPR**) sebagai berikut:

1. Direksi:

Nama

Jabatan

.....

.....

.....

.....

2. Dewan Komisaris:

Nama

Jabatan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

Lampiran 10

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR**)

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham/rapat anggota **) pada tanggal telah diangkat anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris **) dengan susunan sebagai berikut:

Pengurus	Jabatan	Nama Pengurus	
		Lama	Baru
Direksi			
Dewan Komisaris			

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan risalah rapat umum pemegang saham/risalah rapat anggota **), perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan serta bukti pelaporan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang.

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

***) coret yang tidak perlu

Lampiran 11

.....

No. :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pengangkatan/Penggantian **) Pejabat Eksekutif BPR

Dengan ini kami melaporkan pengangkatan/penggantian **) Pejabat Eksekutif BPR
yaitu:

Nama

Jabatan

.....

.....

Terlampir kami sampaikan surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai
Pejabat Eksekutif (bagi Pemimpin Cabang) dari Direksi BPR, disertai dokumen yang
dipersyaratkan.

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor,
Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 12

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pemberhentian Pejabat Eksekutif BPR

Menunjuk surat Bank Indonesia No.....tanggal tentang penolakan pengangkatan Pejabat Eksekutif, dengan ini kami laporkan pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagai berikut:

Nama	Jabatan	terhitung sejak
.....
.....
.....

Terlampir kami sampaikan fotokopi surat pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pejabat Eksekutif BPR.

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 13

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang dengan alamat Kabupaten/Kotamadya, sesuai dengan rencana kerja tahunan BPR kami.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan:

1. analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagai berikut:
 - a. seluruh aspek analisis potensi/kejenuhan
 - b. aspek penetapan lokasi, sasaran pasar yang jelas dan perencanaan SDM
2. bukti setoran modal **).

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

***) apabila diperlukan

Lampiran 14

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. tanggal perihal persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, dengan ini kami mengajukan permohonan izin operasional Kantor Cabang dengan alamat Kabupaten/Kotamadya

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan rencana persiapan operasional antara lain berupa:

- a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
- b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor;
- c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan.

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 15

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang

Berdasarkan surat Bank Indonesia nomor tanggalperihal izin operasional Kantor Cabang dengan ini kami laporkan bahwa Kantor Cabang kami di telah beroperasi sejak tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 16

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Rencana Pembukaan Kantor Kas

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, dengan ini kami mengajukan rencana pembukaan Kantor Kas di Kabupaten/Kotamadya

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan bukti kesiapan Kantor Kas berupa:

- a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
- b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gedung kantor atau nota kesepakatan penggunaan gedung kantor;
- c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 17

.....,

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pembukaan Kantor Kas

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. tanggal perihal penegasan pembukaan Kantor Kas, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan pembukaan Kantor Kas di Kabupaten/Kotamadya sejak tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 18

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, dengan ini kami laporkan pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Kas**)	Lokasi	Sejak Tanggal
1	Kas mobil/kas terapung		
2	Payment Point		
3	Anjungan Tunai Mandiri		

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang **)

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **) yang semula beralamat di Kabupaten/Kotamadya menjadi beralamat di Kabupaten/Kotamadya, dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan:

1. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban kantor pusat/Kantor Cabang **);
2. analisis atas potensi dan kelayakan pendirian kantor pusat/Kantor Cabang **) di tempat kedudukan yang baru yang mencakup:
 - 1) seluruh aspek analisis potensi/kejenuhan
 - 2) aspek penetapan lokasi, sasaran pasar yang jelas dan perencanaan SDM;
3. bukti setoran modal ***).

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

***) apabila diperlukan

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor
Cabang**)

Berdasarkan surat Bank Indonesia No.....tanggal.....perihal persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **), dengan ini kami mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen berupa:

1. bukti pengumuman kepada masyarakat;
2. bukti kesiapan kantor termasuk sarannya, antara lain berupa:
 - a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
 - c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - d. contoh formulir/ warkat;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

***) coret yang tidak perlu

Lampiran 21

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang **)

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **) yang semula beralamat di menjadi beralamat di dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan:

1. alasan pemindahan alamat kantor;
2. bukti pengumuman kepada masyarakat ;
3. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban;
4. bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, antara lain berupa:
 - a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - b. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
 - c. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - d. contoh formulir/ warkat;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau
Kantor Bank Indonesia setempat (bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

***) coret yang tidak perlu

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang **)

Berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor.....tanggal.....tentang izin efektif pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **), dengan ini kami laporkan perpindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang **) pada tanggal dengan data sebagai berikut :

Alamat lama : Kabupaten/Kotamadya Telp. Telex Fax

Alamat baru : Kabupaten/Kotamadya Telp. Telex Fax

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

Lampiran 23

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal kami akan melaksanakan pemindahan Kantor Kas dengan data sebagai berikut:

Alamat lama : Kabupaten/Kotamadya Telp. Telex Fax

Alamat baru : Kabupaten/Kotamadya Telp. Telex Fax

dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan bukti kesiapan Kantor Kas di tempat yang baru.

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 24

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pemindahan Alamat Kantor Kas

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. tanggalperihal penegasan pemindahan alamat Kantor Kas, dengan ini kami memberitahukan bahwa pada tanggal kami telah melaksanakan pemindahan Kantor Kas dengan data sebagai berikut :

Alamat lama : Kabupaten/Kotamadya Telp. Telex Fax

Alamat baru : Kabupaten/Kotamadya Telp. Telex Fax

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 25

.....

No. :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pemindahan Alamat Kegiatan Kas di Luar Kantor

Dengan ini kami laporkan pemindahan alamat Kegiatan Kas di Luar Kantor sebagai berikut:

No	Kegiatan Kas**)	Lokasi Lama	Lokasi Baru	Sejak Tanggal
1	Kas mobil/Kas terapung			
2	Payment Point			
3	Anjungan Tunai Mandiri			

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

***) Coret yang tidak perlu

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha yang Dimiliki BPR dengan Nama yang Baru

Dengan ini kami beritahukan bahwa BPR kami telah memperoleh pengesahan perubahan nama dari instansi berwenang, dari yang semula bernamaberubah menjadi sejak tanggal dengan alasanBerkenaan.dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bank Indonesia untuk memberlakukan izin usaha PT/PD/Kop **) BPR (nama BPR lama) kepada PT/PD/Kop **) BPR

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dan contoh formulir/warkat yang akan digunakan.

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 27

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pengumuman Perubahan Nama BPR

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No..... tanggal..... perihal persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru, dari yang semula bernama PT/PD/Kop **) BPR menjadi PT/PD/Kop **) BPR, dengan ini kami sampaikan bukti pengumuman perubahan nama berupa fotokopi guntingan surat kabar/pengumuman di kantor BPR dan kantor kecamatan setempat **).

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) Coret yang tidak perlu

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR dari menjadi dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan:

1. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar;
2. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
3. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang diperlukan.
4. data kepemilikan disertai dokumen yang diperlukan.

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

Lampiran 29

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. tanggal perihal persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR dari PT/PD/Kop**) menjadi PT/PD/Kop**), dengan ini kami mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dari PT/PD/Kop **) BPR menjadi PT/PD/Kop **) BPR

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan rencana persiapan operasional antara lain berupa:

1. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan, dalam hal terjadi penggantian;
3. data kepemilikan disertai dokumen yang dipersyaratkan, dalam hal terjadi perubahan;
4. akta berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
5. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama.

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 30

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengumuman Perubahan Bentuk Badan Hukum Baru BPR

Sehubungan dengan surat Bank Indonesia No. tanggalperihal persetujuan perubahan bentuk badan hukum baru BPR, dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah mengumumkan perubahan bentuk badan hukum baru BPR.

Terlampir bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum baru BPR berupa fotokopi guntingan surat kabar/pengumuman di kantor BPR dan di kantor kecamatan setempat **).

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

***) coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 31

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Penutupan Kantor Cabang

Dengan ini kami mengajukan permohonan penutupan Kantor Cabang yang beralamat di Kabupaten/Kotamadya dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah serta pihak-pihak lain.

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang

Berdasarkan surat Bank Indonesia No. tanggal perihal izin penutupan kantor cabang BPR, dengan ini kami laporkan bahwa Kantor Cabang BPR kami yang beralamat di Kabupaten/Kotamadya telah kami tutup sejak tanggal

Untuk tertibnya bersama ini kami sampaikan bukti pengumuman berupa fotokopi guntingan surat kabar/pengumuman di kantor BPR dan di kantor kecamatan setempat**).

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

***) coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 33

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Rencana Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **)

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami akan melakukan penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **) yaitu:

No.	Jenis **)	Lokasi	Pada Tanggal
1	Kantor Kas		
2	Kas mobil/kas terapung		
3	Payment Point		
4	Anjungan Tunai Mandiri		

dengan alasan (sebutkan masing-masing).

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

***) coret yang tidak perlu

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **)

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah melakukan penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR **) yaitu:

No.	Jenis **)	Lokasi	Pada Tanggal
1	Kantor Kas		
2	Kas mobil/kas terapung		
3	Payment Point		
4	Anjungan Tunai Mandiri		

Terlampir kami sampaikan bukti pengumuman mengenai rencana penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR**) berupa fotokopi guntingan surat kabar/pengumuman di kantor BPR dan di kantor kecamatan setempat**) sebelum pelaksanaan penutupan dimaksud.

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)

(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat

(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Permohonan Penutupan Kantor Sementara

Dengan ini kami mengajukan permohonan penutupan kantor pusat/Kantor Cabang**) yang beralamat di Kabupaten/Kotamadya dengan alasan, selama hari.

Selanjutnya kami akan membuka kembali kantor pusat/Kantor Cabang**) dimaksud pada tanggal

Demikian permohonan kami.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

***) coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 36

.....

No. :

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pengumuman Penutupan Sementara Kantor

Menunjuk surat Bank Indonesia No. tanggal perihal persetujuan penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) dengan ini kami sampaikan bukti pengumuman penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) yang beralamat di Kabupaten/Kotamadya

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

**) coret yang tidak perlu

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

Lampiran 37

.....

No. :

Kepada

Bank Indonesia

Up. *)

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan Kembali Kantor

Menunjuk surat Bank Indonesia No. tanggal perihal persetujuan penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) dengan ini kami melaporkan pelaksanaan penutupan sementara kantor pusat/Kantor Cabang **) yang beralamat di Kabupaten/Kotamadya sejak tanggal sampai dengan tanggal dan telah dibuka kembali sejak tanggal

Demikian agar maklum.

DIREKSI BPR

Keterangan:

*) Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR)
(bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jaya, Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten); atau

Kantor Bank Indonesia setempat
(bagi BPR yang didirikan di luar wilayah di atas)

***) coret yang tidak perlu

ANALISIS POTENSI DAN KELAYAKAN

A ANALISIS POTENSI

1 Demografi dalam 2 tahun terakhir (kabupaten/kotamadya)

- a. Jumlah penduduk;
- b. Jumlah penduduk yg bekerja;
- c. Pertumbuhan penduduk
- d. Kepadatan penduduk

2 Ekonomi wilayah (kabupaten/kotamadya)

- a. Perbandingan antara perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kotamadya dengan perkembangan PDRB propinsi, sekurang-kurangnya selama 2 tahun terakhir;
- b. Pendapatan per kapita, sekurang-kurangnya selama 2 tahun terakhir;
- c. Sektor ekonomi potensial penyumbang PDRB;
- d. Jumlah dan pertumbuhan pengusaha kecil (terinci menurut sektor ekonomi)

3 Jumlah dan pertumbuhan kelembagaan, sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir (Kabupaten/Kotamadya)

- a. KC/KCP Bank umum,
- b. BPR
- c. BRI Unit, termasuk unit layanan mikro dan lembaga sejenis.
- d. KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya, apabila ada

4 Data Perbankan, sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir (Kabupaten/Kotamadya)

- a. Jumlah dan pertumbuhan tabungan dan deposito bank umum
- b. Jumlah dan pertumbuhan tabungan dan deposito BRI Unit
- c. Jumlah dan pertumbuhan tabungan dan deposito BPR
- d. Jumlah dan pertumbuhan Kredit Usaha Kecil (KUK) Bank Umum
- e. Jumlah dan pertumbuhan Kredit BPR
- f. Jumlah dan pertumbuhan Kupedes untuk BRI Unit Desa dan kredit umum untuk BRI Unit Kota (KCP BRI)

5 Data Lembaga Keuangan Mikro (Kabupaten/Kotamadya), sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir

- a. Jumlah dan pertumbuhan simpanan KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya apabila ada
- b. Jumlah dan pertumbuhan pinjaman KSP dan lembaga keuangan mikro lainnya apabila ada

B ANALISIS KELAYAKAN

1 Penetapan lokasi

- a. Status kepemilikan gedung (beli/sewa)
- b. Informasi lokasi strategis (kedekatan dengan pasar, sekolah, pusat industri, pasar, perumahan) dalam 2 tahun terakhir (kabupaten/kotamadya)

2 Sasaran pasar yg jelas

- a. Sumber dana (fokus jumlah dan sasaran penghimpunan dana, misalnya pedagang, pelajar, pegawai)
- b. Penanaman dana (calon penerima dana yang potensial misalnya, kecil, pedagang, buruh, pegawai) lokasi

3 Proyeksi Keuangan selama 3 tahun (secara bulanan untuk tahun pertama dan secara tahunan untuk dua tahun berikutnya)

- a. Asumsi : pendapatan, biaya, permodalan *)
- b. Proyeksi arus kas
- c. Proyeksi neraca
- d. Proyeksi laba rugi
- e. Proyeksi NPL (dalam persentase)
- f. Proyeksi BEP
- g. Proyeksi ROA (per posisi)
- h. Proyeksi ROE (per posisi)

4 Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Jumlah
- b. Kualifikasi (pendidikan, pengalaman kerja di perbankan, *range* gaji pengurus dan pegawai)
- c. Rencana pengembangan dan pelatihan

5 Persiapan sistem dan prosedur (sistem teknologi informasi, sistem akuntansi, perencanaan *Standard Operating Procedure/SOP*)

*) termasuk informasi mengenai perkembangan rata-rata suku bunga perbankan (*Bank Umum, BPR, BRI Unit Desa dan KSP dengan lembaga keuangan mikro lainnya*)

Lampiran 39

WILAYAH KERJA KANTOR PUSAT DAN KANTOR BANK INDONESIA

No	Nama Kantor	Alamat Kantor	Wilayah Kerja
1	Kantor Pusat Bank Indonesia	Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 11010	DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Bogor, Karawang, Depok dan Provinsi Banten,
2	KBI Ambon	Jl. Raya Pattimura No.7 Ambon	Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Ambon.
3	KBI Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.20, Balikpapan 76111	Kabupaten Pasir, Kota Balikpapan
4	KBI Banda Aceh	Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh	Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, Kota Sabang
5	KBI Bandarlampung	Jl. Hasanuddin No.38, Bandar Lampung 35211	Provinsi Lampung
6	KBI Bandung	Jl. Braga No.108, Bandung 40111	Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten/Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang
7	KBI Banjarmasin	Jl. Lambung Mangkurat No.15, Banjarmasin 70111	Provinsi Kalimantan Selatan
8	KBI Batam	Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432	Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau Timur, Kabupaten Natuna, Kota Batam
9	KBI Bengkulu	Jl. Jend. Ahmad Yani, Bengkulu	Provinsi Bengkulu
10	KBI Cirebon	Jl. Yos Sudarso No.5-7, Cirebon	Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka
11	KBI Denpasar	Jl. W.R. Supratman 1, Denpasar	Provinsi Bali
12	KBI Jayapura	Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura	Provinsi Irian Jaya
13	KBI Jambi	Jl. Jend, Ahmad Yani, Telanaipura	Provinsi Jambi
14	KBI Jember	Jl. Gajah Mada No.224, Jember	Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

No	Nama Kantor	Alamat Kantor	Wilayah Kerja
15	KBI Kediri	Jl. Brawijaya No.2, Kediri	Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung
16	KBI Kendari	Jl. Sultan Hasanuddin No. 150, Kendari 93122	Provinsi Sulawesi Tenggara
17	KBI Kupang	Jl. Tom Pello No.2, Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
18	KBI Lhokseumawe	Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe 24312	Kabupaten Aceh Jeumpa, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara.
19	KBI Makassar	Jl. Jend. Sudirman No.3, Makasar	Provinsi Sulawesi Selatan
20	KBI Malang	Jl. Merdeka Utara No.7 / Jl. Merdeka Timur No.1, Malang	Kabupaten Lumajang, Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo
21	KBI Mataram	Jl. Pejangik No.2, Mataram 83126	Provinsi Nusa Tenggara Barat
22	KBI Medan	Jl. Balai Kota No.4, Medan	Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kota Tebingtinggi
23	KBI Manado	Jl. 17 Agustus, Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo
24	KBI Padang	Jl. Jend. Sudirman No.22, Padang	Provinsi Sumatera Barat
25	KBI Palangka Raya	Jl. Diponegoro No.17, Palangkaraya 73111	Provinsi Kalimantan Tengah
26	KBI Palembang	Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27	KBI Palu	Jl. Sam Ratulangi No.23, Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
28	KBI Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No.464, Pekanbaru	Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan hulu, Kabupaten Siak, Kota

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004

No	Nama Kantor	Alamat Kantor	Wilayah Kerja
			Dumai, Kota Pekanbaru.
29	KBI Pontianak	Jl. Rahadi Usman No.3, Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
30	KBI Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98, Purwokerto 53116	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga
31	KBI Samarinda	Jl. Gajah Mada No.1, Samarinda	Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bulungan Selatan, Kabupaten Bulungan Timur, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kota Tarakan
32	KBI Semarang	Jl. Imam Bardjo SH No.4, Semarang	Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten/Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten/Kota Semarang, Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga
33	KBI Sibolga	Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513	Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kota Sibolga.
34	KBI Solo	Jl. Jend. Sudirman No.4, Solo	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Solo
35	KBI Surabaya	Jl. Pahlawan No.105, Surabaya	Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Surabaya
36	KBI Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112	Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya
37	KBI Ternate	Jl. Jos Sudarso, Ternate	Provinsi Maluku Utara
38	KBI Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No.4-6, Yogyakarta 55121	Daerah Istimewa Yogyakarta